

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam perubahan anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja Kecamatan Gunem mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program SKPD Kecamatan Gunem yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023;
3. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gunem sebagai wujud dari kinerja tahun 2023 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri NO: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunem adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Rembang tahun 2023.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran APBD.

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA. 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tahun 2023 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Gunem tahun 2023;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Gunem. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gunem adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi. Penyusunan Perubahan Renja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Gunem dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

##### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNEM**

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Gunem

##### **BAB IV .PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun 2023**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tahun 2023 sampai dengan triwulan II pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang selama tahun 2023. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gunem yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Nol semua memenuhi target Kinerja.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Realisasi program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gunem pada tahun 2023 yang meliputi 6 Program dan 13 Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2023, sebagaimana tabel berikut adalah tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 s/d triwulan II :
3. Sasaran Kecamatan Gunem Tahun 2023 adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang mempunyai target IKM 83 dengan realisasi Na karena belum melaksanakan survei ditahun 2023.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
  - a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

- b. Meningkatnya kualitas Sarana Prasaran Aparatur
- c. Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
- d. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan Desa yang akuntabel.
- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :
  - Perlu adanya penambahan Personil di Kecamatan Gunem
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Gunem sampai dengan Triwulan II tahun 2023 berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam Tabel 2.1 dan 2.2 berikut :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II (Semester 1 tahun 2023)  
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	10	11=(10/4)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>68 nilai</b>	<b>68,92 nilai</b>	<b>68 nilai</b>	<b>na</b>	0%	<b>na</b>	0%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	50%	100%	50%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5%	1 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	70%	4 Laporan	70%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100 %	100 %	50 %	95%	50 %	95%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	60%	15 Orang/bulan	60%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	75%	2 Dokumen	75%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>% Pemenuhan Pelayanan Umum</i>	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Paket	50%	6 Dokumen	50%	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik % Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	50 % 50 %	50%	50 % 50 %	50%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	30%	3 Laporan	30%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	30%	3 Laporan	30%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi baik % Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	40 % 40 %	40%	40 % 40 %	40%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	60%	14 Unit	60%	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	30%	15 Unit	30%	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>50 %</b>	60%	<b>50 %</b>	60%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	<i>%Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	50%	3 Laporan	50%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persetase Pendes yang lunas bayar PBB</i>	98 %	98 %	98 %	60 %	60%	60 %	60%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah desa dengan s w a d a y a m20.000.000,-</b>	<b>6 desa</b>	<b>6 desa</b>	<b>6 desa</b>	4 desa	70%	4 desa	70%	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu	96 % 90 %	96 % 90 %	96 % 90 %	50 % 50 %	50%	50 % 50 %	50%	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakatan	4 Lembaga K emasyarakatan	4 Lembaga K emasyarakatan	4 Lembaga K emasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>50 %</b>	50%	<b>50 %</b>	50%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	100%	<b>99 %</b>	100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	100%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik</b>	<b>97 %</b>	<b>78 %</b>	<b>97 %</b>	<b>60 %</b>	60%	<b>60 %</b>	60%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Rata-rata IKM desa</i>	74 nilai	74 nilai	74 nilai	Na	na	Na	na
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	50%
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	50%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif								

		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----------	----





### **Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2023**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gunem Tahun 2023, Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gunem sampai dengan semester satu tahun 2023 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2  
 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang  
 Triwulan II Tahun 2023

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Anggaran APBD tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II tahun 2023	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=8/7*100
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>2.199.350.420</b>	<b>1.058.041.872</b>	48,10
<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.199.350.420</b>	<b>1.058.041.872</b>	48,10
7.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	68	na	-	<b>1.946.950.420</b>	<b>862.934.347</b>	44,32
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	75	75	22.400.000	299.970	1,3
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	1	50	12.400.000	-	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	50	-	-	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	2	50	10.000.000	299.970	2,9
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	50	50	1.597.555.400	761.148.652	47,64
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	14	100	1.523.455.400	760.448.882	49,91
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	6	50	69.100.000	21.420.000	30,99
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	2	100	5.000.000	399.800	7,9
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	% dokumen kepegawaian yang dikelola	100	50	50	12.000.000	1.150.000	

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Anggaran APBD tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II tahun 2023	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=8/7*100
	Daerah	dengan baik				-	-	9,58
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokumen Kpegawaian yang dikelola dengan baik	3	21	100	12.000.000	1.150.000	9,58
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	50	50	80.475.020	15.129.725	18,80
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	6	50	5.000.000	1.139.325	22,78
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	6	50	15.000.000	5.071.400	33,80
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	6	50	5.475.020	660.000	12,05
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	6	50	2.000.000	450.000	22,5
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	6	50	25.000.000	6.559.000	26,23
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50	28.000.000	1.250.000	4,46
7.01.01.2.07	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercukupan sarana prasarana kantor	60	0	50	165.677.480	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	0	50	15.677.480	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	50	150.000.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	50	50	194.520.000	74.778.000	38,44
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	-	-	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	50	24.000.000	7.018.000	29,24
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	50	170.520.000	67.760.000	39,73

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Anggaran APBD tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II tahun 2023	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=8/7*100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	100	50	50	40.000.000	10.428.000	26,07
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	100	30.000.000	8.943.000	29,81
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	100	10.000.000	1.485.000	14,85
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	95	48	51	<b>28.525.000</b>	<b>7.775.000</b>	27,25
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	50	50	10.800.000	2.775.000	25,69
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100	10.800.000	2.775.000	25,69
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	96	50	52	17.725.000	5.000.000	28,20
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	100	17.725.000	5.000.000	28,20
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	35	75	214	<b>95.000.000</b>	<b>46.249.000</b>	46,24
		<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	4	9	225		-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	75	75	95.000.000	46.249.000	46,24
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	4	100	35.000.000	30.149.000	86,14
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16	7	44	60.000.000	16.100.000	26,83

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Anggaran APBD tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II tahun 2023	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=8/7*100
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	100	100	<b>32.875.000</b>	<b>2.500.000</b>	7,60
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100	100	100	32.875.000	2.500.000	7,60
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	8	67	32.875.000	2.500.000	7,60
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan baik	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.0201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	50	50	<b>30.000.000</b>	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	3	3	100	30.000.000	-	-
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	80	100	30.000.000	-	-
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	97	50	50	<b>66.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	13,63
7.01.062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	74	na	na	66.000.000	9.000.000	13,63
7.01.062.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	16	16	100		0	-

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Anggaran APBD tahun 2023	Realisasi APBD Triwulan II tahun 2023	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$	7	8	$9=8/7*100$
	Desa	rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20.000.000		
7.01.062.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	3	100	31.000.000	5.250.000	16,93
7.01.062.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	3	100	15.000.000	3.750.000	25
7.01.062.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	-	-

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunem adalah melaksanakan fungsi sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunem mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gunem Tahun 2021-2026 Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan administrasi Pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunem**  
**Triwulan II Tahun 2023**

No	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisa
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Triwulan II tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	<b>Renstra 2020-2021</b>							
	IKM Kecamatan Gunem	78	79	82,6	na	81	82,6	
2	<b>Renstra 2021-2026</b>							
	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	78	79	82,6	na	81	82,6	

## **2.2 Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik karena banyaknya peralatan yang rusak ;
2. Kurangnya SDM yang ada di Kecamatan;
3. Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang masih belum Optimal;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## **2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunem**



Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Gunem harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

1. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;

9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretaris Kecamatan

### a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### b. Fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

### Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;

- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

##### Tugas Pokok :

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

##### Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

- c. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
- j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2023. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal perubahan diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4.

## Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Rembang

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Gunem			1.806.847.714	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Gunem			1.806.847.714	
7,01	KECAMATAN				1.806.847.714	KECAMATAN				1.806.847.714	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	68	1.724.272.714	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	68	1.973.102.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	21.750.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	9.500.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	9.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3.250.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	1.484.158.514	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	1.512.217.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.462.338.714	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.449.217.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	21.420.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	58.500.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	399.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	4.500.000	



Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	1.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	-	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	21	1.150.000	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	21		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	100	27.046.558	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	100	33.135.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	2.041.425	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	6.950.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	13.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	660.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	3.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1050.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	15.095.133	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	14.535.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	202.000.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	196.000.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	202.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	196.000.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	172.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	172.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	210.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	100	210.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>95</b>	<b>85.800.175</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>95</b>	<b>85.800.175</b>	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		% penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	27.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		% penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	27.100.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	27.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	27.100.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	96	58.700.175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	96	58.700.175	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	58.700.175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	58.700.175	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	<b>35</b>	<b>81.963.700</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	<b>35</b>	<b>76.483.700</b>	
			<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>			<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	<b>4</b>		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	81.963.700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	76.483.700	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	24.520.000	
7.01.03.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	16	51.963.700	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	16	51.963.700	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	100	<b>33.900.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	100	<b>51.900.000</b>	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100	33.900.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100	51.900.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	33.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	51.900.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan baik	100	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan baik	100	-	
	Koordinasi/Sinergi dengan Pejabat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)		-	Koordinasi/Sinergi dengan Pejabat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)		-	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	<b>14.400.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	<b>14.400.000</b>	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan	3	14.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan	3	14.400.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023					Hasil analisa Kebutuhan					Cat.Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sesuai Penugasan Kepala Daerah		kebangsaan			sesuai Penugasan Kepala Daerah		Urusan Pemerintahan Umum			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	14.400.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	14.400.000	
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	97	<b>15.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	96	<b>45.680.000</b>	
7.01.062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	74	15.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	70	45.680.000	
7.01.062.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	15.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	30.680.000	
7.01.062.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	-	
7.01.062.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	15.000.000	

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gunem pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Pemerintah kabupaten Rembang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNEM**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Gunem tersaji dalam table berikut.

Tabel 3.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gunem  
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik										
2		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	80,85	82,6	81	82	83	84	85

**1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gunem.

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

**III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

**VI. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah program dan kegiatan pada TA. 2023 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program dan 13 kegiatan merupakan satu kesatuan dalam urusan umum. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.265.027.900,- Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Gunem tahun 2023 sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2.

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gunem tahun 2023  
Dan Prakiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumb er Dana	Cat.Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.667.921.00 0	2.365.027.900	1.806.847.714				3.258.000.000
7,01	KECAMATAN					2.667.921.00 0	2.365.027.900	1.806.847.714				3.258.000.000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kec. Gunem	68	68	2.429.000.00 0	1.946.950.420	1.724.272.714	DAU		68,5	2.633.000.000
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Gunem	80	80	25.000.000	22.400.000	300.000	DAU		100	80.000.000
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Gunem	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	12.400.000	-	DAU		2 dokumen	40.000.000
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Gunem	1 laporan	1 laporan	15.000.000	10.000.000	300.000	DAU		4 dokumen	20.000.000
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Kec. Gunem	90	90	1.880.000.000	1.597.555.400	1.484.158.514	DAU		100	1.950.000.000
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gunem	15 Orang/bula n	15 Orang/bula n	1.750.000.000	1.523.455.400	1.462.338.714	DAU		14 Orang/bula n	1.800.000.000
7.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Gunem	12 dokumen	12 dokumen	120.000.000	69.100.000	21.420.000	DAU		12 dokumen	130.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat. Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Gunem	1 laporan	1 laporan	5.000.000	5.000.000	399.800	DAU		2 laporan	10.000.000
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	Kec. Gunem	100	100	50.000.000	12.000.000	1.150.000	DAU		100	55.000.000
7.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Gunem	14 dokumen	14 dokumen	50.000.000	12.000.000	1.150.000	DAU		1	55.000.000
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	Kec. Gunem	100	100	87.000.000	80.475.020	27.046.558	DAU		100	140.000.000
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Gunem	1 paket	1 paket	2.000.000	-	-	DAU		1 paket	5.000.000
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Gunem	1 paket	1 paket	3.000.000	5.000.000	2.041.425	DAU		1 paket	10.000.000
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Gunem	1 paket	1 paket	20.000.000	15.800.000	6.950.000	DAU		1 paket	30.000.000
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Gunem	1 paket	1 paket	3.000.000	5.475.020	660.000	DAU		1 paket	7.500.000
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Gunem	12 dokumen	12 dokumen	2.000.000	2.000.000	1.050.000	DAU		12 dokumen	7.500.000
7.01.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Kec. Gunem	1 paket	1 paket	17.000.000	25.000.000	15.095.133	DAU		1 paket	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat. Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		yang Disediakan										
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	25.000.000	28.000.000	1.250.000	DAU		1 tahun	35.000.000
7.01.01.2.0 7	Pegadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercukupan sarana prasarana kantor	Kec. Gunem	60	60		165.677.480	15.677.480	DAU			
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec. Gunem	1 unit	1 unit		15.677.480	15.677.480	DAU			
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Gunem	1 unit	1 unit		150.000.000	0	DAU			
7.01.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Gunem	1 unit	1 unit		150.000.000	0	DAU			
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Gunem	100	100	212.000.000	194.520.000	182.520.000	DAU		100	218.000.000
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	2.000.000	-	-	DAU		1 tahun	3.000.000
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	30.000.000	24.000.000	12.000.000	DAU		12 laporan	25.000.000
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	180.000.000	170.520.000	170.520.000	DAU		12 laporan	190.000.000
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	Kec. Gunem	75	75	175.000.000	40.000.000	13.420.162	DAU		100	190.000.000
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	Kec. Gunem	14 Unit	14 Unit	25.000.000	30.000.000	11.265.162	DAU		15 unit	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat.Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Gunem	15 Unit	15 Unit	-	10.000.000	2.155.000	DAU		14	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Gunem	1 Unit	1 Unit	150.000.000	-	-	DAU		1 unit	160.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	<b>Kec. Gunem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>28.525.000</b>	<b>7.775.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>140.000.000</b>
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Gunem	95	95	50.000.000	10.800.000	7.775.000	DAU		100	55.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	50.000.000	10.800.000	2.775.000	DAU		5	55.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	Kec. Gunem	85	85	150.000.000	17.725.000	5.000.000	DAU		90	85.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunem	12 laporan	12 laporan	150.000.000	17.725.000	5.000.000	DAU		12	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat. Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>		90	90	35.000.000	95.000.000	51.100.000	DAU		100	160.000.000
		<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>		2 desa	2 desa						4	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Kec. Gunem	90	90	35.000.000	95.000.000	51.100.000	DAU		100	160.000.000
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Gunem	100%	80 lembaga kemasyarakatan	45.000.000	30.000.000	35.000.000	DAU		80 lembaga kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.0 1.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunem	100%	16 dokumen	100.000.000	66.000.000	16.100.000	DAU		16 dokumen	110.000.000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>		100	100	75.000.000	32.875.000	-	DAU		100	50.000.000
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	Kec. Gunem	100	100	45.000.000	32.875.000	-	DAU		100	50.000.000
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Gunem	100%	12 laporan	45.000.000	32.875.000	-	DAU		12 laporan	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat.Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan baik	Kec. Gunem	100	100	30.000.000	-	-				35.000.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Pejabat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)		100%	12	30.000.000	-	-				35.000.000
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>12.200.000</b>	DAU		<b>100</b>	50.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Gunem	3	3	45.000.000	30.000.000	12.200.000	DAU		100	50.000.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Kec. Gunem	100%	80 orang	45.000.000	30.000.000	12.200.000	DAU		1	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Cat. Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>		97	97	115.000.000	66.000.000	9.000.000	DAU		100	225.000.000
7.01.062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Kec. Gunem	74	74	115.000.000	66.000.000	9.000.000	DAU		70	225.000.000
7.01.062.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Gunem	100%	16 dokumen	80.000.000	20.000.000	-	DAU		3	185.000.000
7.01.062.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Gunem	3	3	-	31.000.000	5.250.000	DAU		3	-
7.01.062.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Gunem	3	3	-	15.000.000	3.750.000	DAU		3	-
7.01.062.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Gunem	100%	3 dokumen	35.000.000	0	-	DAU		3	40.000.000

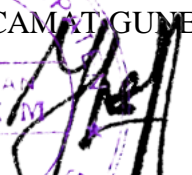
## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Rembang di Kecamatan Gunem.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Gunem ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “**Rembang Gemilang 2026**”.

Rembang, 9 Oktober 2023  
CAMAT GUNEM  
  
**KASTALI, SH**  
Pembina  
NIP. 19680518 199503 1 002

